

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, UI-Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi cetakan keempat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fadjar, Mukthie, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional (Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Nanti)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kumolo, Tjahyo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta.

Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, cetakan kedua)*, Total Media, Yogyakarta.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Mahkamah Konstitusi)*, UII-Press, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku IV Kekuasaan Kehakiman), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

M. Hadjon, Phillipus dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Gaffar, Jenedjri, 2013, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Kon-prees, Jakarta.

_____, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia I*, Kon-press, Jakarta.

_____, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kamis, 15 Januari 2015, Pukul 20.00-22.28 WIB.

Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jum'at 16 Januari 2015, Pukul 14.00.

Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Senin 19 Januari 2015, Pukul 15.00 WIB.

Sandi, Andi, 2017, *Dalam Kuliah Penyelesaian Sengketa Pemilu*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

SW Sumardjono, Maria 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Triana Budiarti, Rita, 2015, *Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva*, Kon-press, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1709).

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722).

Putusan MK Nomor 072-073 /PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Putusan MK No. 48/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Putusan MK No. 24/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi
Papua Tahun 2015.

Putusan MK Nomor 120/PHP/Bup-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabuten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2015.

Putusan MK No. 14/PHP.BUP-XVI/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tahun 2017.

C. Jurnal, Majalah, Makalah, dan Skripsi dan :

Dasuki, 2012, Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tentang
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota
Pekanbaru), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Fahmi, Khairul, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD
1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.2 Desember 2016, Fakultas Syariah Dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta.

Hasan Sadikin, Usep, *Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada, Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Vol 8, April 2016, Yayasan Perludem, Jakarta.

Hussein, Azka, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati, Pandecta*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

International Institute For Democracy And Electoral Assistance, 2010, *Keadilan Pemilu (Ringkasan Buku Acuan Intenational IDEA)*, Terjemahan Atas Kerjasama International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO, Indonesia Printer, Jakarta.

MD, Mahfud *Evaluasi Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, Dalam Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta 24-26 Januari 2012, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Surbakti, Ramlan, dkk, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara (seri demokrasi elektoral), Kemitraan Partnership*, Buku 13, September 2011, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Wiryadi, Ilham, dkk, *Majalah Konstitusi* Nomor 122, April 2017, *Pertarungan Calon Abdi Daerah Di MK*, Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Wibowo, Mardian, Menakar Konstitusionalisme Sebuah Kebijakan Hukum
Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12
Nomor 2 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalarta.

Munte, Herdi, dkk, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsiantar
Tahun 2015), *USU Law Journal*, Vol.5 No.1 Januari 2017, Fakultas Hukum
Universitas Sumatra Utara, Medan

D. Koran dan Internet :

Bil Wahid, Ahmad, KPU, Penyebab PSU Paling Dominan Karena Pemilih Nyoblos
2 Kali, <https://news.detik.com/berita/d-3431772/kpu-penyebab-psu-paling-dominan-karena-pemilih-nyoblos-2-kali>, diakses pada Senin, 18 Desember
2017, Pukul, 12.41 WIB.

Lee, Antony, dkk, Pertaruhan Politik Representatif, Opini Kompas, Edisi Senin 18
Desember 2017.

Ramdani, Dian, Perludem, PSU Jadi Bukti Pengawasan Pilkada Tak Intensif,
<https://nasional.sindonews.com/read/1200625/12/perludem-psu-jadi-bukti-pengawasan-pilkada-tak-intensif-1493279672>, diakses pada Senin, 18
Desember 2017, Pukul 12.29 WIB.

Surbakti, Ramlan, *Kerawanan Pemilu*, Opini Kompas, Edisi Rabu, 13 Desember,
2017.